

Abstrak

Aplikasi Digipay merupakan aplikasi *e-commerce* buatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diperuntukkan kepada satuan kerja pemerintah dalam rangka pengelolaan kas pada belanja negara yang melalui uang persediaan (UP). Aplikasi Digipay diharapkan dapat mempermudah satuan kerja dalam melakukan belanja negara melalui mekanisme UP, serta dapat mendorong digitalisasi UMKM, sehingga UMKM dapat mengakses pasar yang lebih besar. Namun, dalam hasil penelitian ini pada praktik implementasinya masih terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi satuan kerja dan penyedia barang/jasa sebagai pengguna aplikasi Digipay, khususnya dalam lingkup kerja KPPN Larantuka. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin menangkap gambaran besar bagaimana implementasi aplikasi Digipay yang telah berjalan pada lingkup kerja KPPN Larantuka serta kendala apa saja yang terjadi baik dari sisi satuan kerja, maupun penyedia barang/jasa. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan menganalisa data realisasi belanja pada aplikasi Digipay yang dilakukan satuan kerja lingkup KPPN Larantuka, serta dengan mewawancarai berbagai pihak yang terlibat dalam pengimplementasian aplikasi Digipay pada lingkup kerja KPPN Larantuka. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pertimbangan pengambil keputusan dalam implementasi aplikasi Digipay khususnya pada lingkup kerja KPPN Larantuka.

Kata Kunci : Digipay, Belanja Negara, digital payment

Abstract

The Digipay application is an e-commerce application made by Direktorat Jenderal Perbendaharaan which is intended for government work units in the context of cash management for government spending through Uang Persediaan (UP). The Digipay application is expected to make government work units easier for doing government spending through UP mechanism, and encourage UMKM digitalization, so that UMKM can access a larger market. However, in the results of this research, in practice implementation there are still various of constraint and obstacles that faced by government work units and goods/service providers as users of the Digipay application, especially within the scope of work KPPN Larantuka. So in this research the authors wants to capture the big picture how the implementation of the Digipay application that has been running within the scope of work KPPN Larantuka and what kind of constraint and obstacle that faced by government work units and goods/service providers. This research was carried out using qualitative method by analyze government spending data on the Digipay application that carried out by government work units within the scope of work KPPN Larantuka, and then by interviewing several parties that involved implementing the Digipay application within the scope of work KPPN Larantuka, It is hoped that the results of this research can be used in the considerations of decision makers in implementing the Digipay application, especially in the scope of work of KPPN Larantuka.

Keywords : Digipay, Government Spending, digital payment